

# Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan

Oleh D. BISMOKO MAHAMBORO, PR\*

Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan merupakan bagian yang integral dalam spiritualitas Kristiani. Tanpa memperjuangkan ketiga hal ini, pewartaan Gereja mengenai Kabar Gembira akan terasa timpang dan tidak utuh. Mengapa timpang atau tidak utuh? Karena Gereja meneruskan tugas perutusan Yesus sebagaimana tertulis di Injil: “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.” (Lk 4:18-19). Ini dikatakan Yesus di awal karya-Nya. Ia menyadari bahwa misi-Nya adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah. Mengenai Kerajaan Allah, St. Paulus menulis: “... Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.” (Rm 14:17). Karena semakin menyadari hal ini, di keuskupan-keuskupan mulai dibentuk komisi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (*justice, peace, and integrity of creation*). Beberapa kongregasi atau tarekat religius bahkan telah terlebih dahulu mendirikan komisi ini sebagai bagian dari karya kerasulan mereka.

## Asal usul istilah

Pada tahun 1970an hingga 80an, di dalam pertemuan-pertemuan Dewan Gereja-gereja Sedunia (*World Council of Churches*), yakni forum Gereja-gereja Kristen

dari berbagai macam denominasi, diangkat keprihatinan mengenai perkembangan yang terjadi di dunia. Setelah Perang Dunia II usai, banyak negara-negara terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, memperoleh kemerdekaannya. Dunia memulai babak baru setelah kolonialisme berlalu. Negara-negara ditantang untuk saling bekerjasama sebagai rekan yang setara dan sederajat. Namun, rupanya kesenjangan antara negara miskin dan kaya semakin melebar. Ditambah lagi, ketegangan dua blok besar yang berkuasa, yakni Blok Barat dan Blok Timur, makin menguat. Menghadapi situasi politik global ini, WCC merasa terpanggil untuk terlibat mewujudkan masyarakat dunia yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan (*just, participatory, sustainable society*).

Dalam Sidang Umum ke-6 di Vancouver, Kanada, pada tahun 1983, arah keterlibatan gereja-gereja anggota WCC mengalami “modifikasi” menjadi komitmen untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (*justice, peace, and integrity of creation*). Istilah “berkelanjutan” (*sustainable*) sebetulnya telah mencakup kepedulian terhadap persoalan lingkungan alam. Namun, nuansa yang terkandung di dalamnya masih terpusat pada manusia; eksistensi alam demi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, istilah “berkelanjutan” disempurnakan dengan istilah lain, yakni “keutuhan ciptaan” (*integrity of creation*). Istilah yang terakhir ini tidak menempatkan manusia sebagai yang lebih penting daripada ciptaan lain, melainkan seluruh

ciptaan mempunyai nilai intrinsik dalam dirinya. Semua ciptaan saling terhubung.

Di lingkup Gereja Katolik, berkembang keprihatinan yang sama seperti di WCC. Perkembangan bangsa-bangsa yang menjanjikan masa depan hidup bersama yang lebih baik memang diapresiasi Paus Paulus VI yang menulis ensiklik *Populorum Progressio* (1967). Pendahulu Paulus VI, yakni Paus Yohanes XXIII, sebelumnya telah menyadari bahwa menjaga perdamaian menjadi tugas penting Gereja. Di masa eskalasi ketegangan Blok Barat dengan Blok Timur, ia menulis ensiklik *Pacem in Terris* (1963). Selain itu, ketika perhelatan Konsili Vatikan II berlangsung, gagasan untuk membentuk suatu komisi yang berhubungan dengan perjuangan keadilan dan perdamaian juga muncul. Di dalam *Gaudium et Spes* dinyatakan demikian: “Adapun misi khusus, yang oleh Kristus telah dipercayakan kepada Gereja-Nya, tidak terletak di bidang politik, ekonomi atau sosial; sebab tujuan yang telah ditetapkan-Nya untuk Gereja bersifat keagamaan (*religiös-red.*). Tentu saja dari misi keagamaan itu sendiri muncullah tugas, terang dan daya-kekuatan, yang dapat melayani pembentukan dan peneguhan masyarakat manusia menurut Hukum Ilahi.” (GS 42). Maka pada tahun 1967, sesuai amanat KV II, Paus Paulus VI membentuk Komisi untuk Keadilan dan Perdamaian (*Pontifical Commission for Justice and Peace*). Pada tahun 1988, Paus Yohanes Paulus II mengubah status sebagai “komisi” menjadi “Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian” (*Pontifical Council for Justice and Peace*).

Rupanya, kendati seakan berjalan sendiri-sendiri, baik Gereja Katolik maupun Gereja Protestan/Reformasi mempunyai keprihatinan yang sama dan telah berusaha merumuskan kembali tugas perutusan di tengah perkembangan dunia yang seperti itu.

Setelah pertemuan di Vancouver, tema mengenai keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan diolah kembali. Pada tahun 1989, Konferensi Gereja-gereja Eropa yang merupakan forum kerjasama perwakilan-perwakilan Gereja Anglikan, Ortodox, Protestan, dan lain-lain, menyelenggarakan Pertemuan Ekumenis Eropa yang pertama di Basel, Swiss. Dalam perhelatan ini, Konferensi Uskup-uskup Gereja Katolik di Eropa diudang. Di Basel inilah untuk pertama kalinya Gereja Katolik dan Gereja Protestan bertemu setelah beratus-ratus tahun saling ambil jarak akibat peristiwa Reformasi Protestan. Sejak saat itu, telah diadakan beberapa kali pertemuan ekumenis berskala internasional untuk membahas dan menegaskan kembali komitmen Gereja terhadap keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Kini kosakata keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (atau yang lazim diingat orang dengan akronim JPIC, *justice, peace, and integrity of creation*) telah sering terdengar di lingkup Gereja Katolik. Namun sebetulnya, apa makna dan cakupan JPIC ini?

### Keadilan

Sebagaimana telah disinggung di atas, KV II mendesak pendirian suatu lembaga gerejawi yang bersifat internasional, yang tugasnya adalah mempromosikan keadilan. GS artikel 90 menyatakan demikian:

*“Adapun Konsili, seraya mengindahkan penderitaan-penderitaan tiada*

*hingganya, yang sekarang pun masih menyiksa mayoritas umat manusia, lagi pula untuk di mana-mana memupuk keadilan maupun cinta kasih Kristus terhadap kaum miskin, memandang sangat pada tempatnya mendirikan suatu lembaga universal Gereja, yang misinya ialah mendorong persekutuan umat katolik, supaya kemajuan daerah-daerah yang miskin serta keadilan internasional ditingkatkan.”*

Atas dasar amanat untuk memperjuangkan keadilan, khususnya bagi mereka yang miskin dan mengalami ketidakadilan, maka dibentuklah lembaga yang kini disebut Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Tujuan

Dalam kacamata iman Kristiani, manusia adalah “citra Allah” (*imago Dei*) sehingga ia adalah tujuan pada dirinya dan tidak boleh pernah dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Sampai hari ini, kasus-kasus perendahan martabat manusia tidak pernah berhenti: mulai eksploitasi tenaga kerja murah, perdagangan manusia (*trafficking*), aborsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kekerasan atau pengucilan terhadap kelompok-kelompok minoritas religius.

Ketidakadilan terjadi di dalam masyarakat ketika pihak yang lebih lemah tidak mampu/



didirikannya lembaga ini ialah untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan dalam terang Injil dan Ajaran Sosial Gereja (ASG). Untuk itu, lembaga kepausan ini bertugas memperdalam dan memperkenalkan kekayaan pandangan-pandangan Gereja yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip ASG ke dalam persoalan sosial konkret.

Munculnya ASG dalam tradisi Gereja Katolik didorong oleh keprihatinan akan pelanggaran dan perendahan martabat manusia. Martabat manusia ini adalah prinsip utama yang mendasari semua ASG.

dapat berpendapat atau berbuat sebagaimana pihak yang lebih kuat. Pihak yang lebih kuat, entah secara politis atau ekonomi, mendapat keuntungan karena mereka dapat memaksakan kehendaknya. Gagasan bahwa pihak yang paling lemah adalah ukuran keadilan di dalam masyarakat, sejalan dengan konsep keadilan yang kita temukan dalam tradisi Yudeo-Kristiani, di mana Allah ditampilkan sebagai pembela kaum lemah yang tidak mampu mempertahankan dirinya di bidang sosial, ekonomi, atau hukum (lih. Kel 22:21dst; Mzm 146:9; Yes 10:12, Yer 5:28). Maka, membela mereka yang tersingkir,

tertindas, dan terampas hak-haknya, selain merupakan pembelaan terhadap martabat manusia, merupakan bentuk kesaksian akan Kabar Gembira.

### Perdamaian

Istilah biblis untuk damai adalah *shalom*. Kata ini punya pengertian yang luas dan komprehensif. Ia tidak hanya meliputi situasi tiadanya kekerasan atau perang, tapi juga mencakup kesehatan jasmani, kesejahteraan [material], kepuasan, ketenangan, hidup yang seimbang di dalam masyarakat. Jika seseorang mengalami *shalom*, ia tidak saja sekadar mengalami suasana nyaman dan aman tanpa gangguan atau ancaman, namun ia juga mempunyai harapan baru karena ia telah "didamaikan" (mengalami rekonsiliasi) dan kembali mengalami keselarasan dengan yang lain. *Shalom* menunjuk pada situasi keutuhan, keseimbangan, harmoni, di mana kebutuhan-kebutuhan dua pihak diakui dan diterima secara proporsional. Di dalam pengertian *shalom*, diandaikan adanya relasi antara pihak-pihak yang berfungsi dengan baik. Maka, *shalom* mencakup pengertian damai antara kita dengan Allah, kita dengan sesama, dan kita dengan lingkungan. Gagasan dari keseimbangan, keutuhan, harmoni yang menyeluruh di dalam istilah *shalom* menunjuk baik pada tataran individual, komunal, maupun juga lingkungan hidup.

Beberapa tahun silam, ketika rezim Orde Baru berkuasa, kita mengenal pengertian "damai" dalam konteks keamanan dan stabilitas nasional. Dari kacamata rezim yang berkuasa, gerakan protes atau konflik antar kelompok, merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Maka tindakan yang dilakukan rezim seringkali bersifat represif. Penyelesaian konflik antar anggota

masyarakat dilakukan dengan pendekatan militeristik. Ini mungkin dapat meredam konflik, namun hanya untuk sementara waktu. Kendati situasi kembali menjadi aman, namun bisa jadi itu hanya di permukaan. Seringkali terjadi, dendam dan permusuhan antara pihak-pihak yang berperkara belum sama sekali padam. Di lain waktu, ketegangan-ketegangan baru bisa meledak. Hal ini sudah terjadi berkali-kali di negeri kita.

Bangsa Indonesia bagaikan sebuah "perahu retak" menurut budayawan Emha Ainun Nadjib. Pada tahun 1995, ia menulis lirik lagu dengan judul tersebut, yang nadanya kemudian diciptakan oleh Franky Sahilatua. Dalam lagu itu digambarkan bahwa bangsa Indonesia mendiami bumi yang subur dan rakyat sebetulnya bisa mengalami kemakmuran. Namun, perjalanan menuju kepada kesejahteraan untuk semua ternyata tidak mudah. Bagaikan sebuah perahu retak, bangsa Indonesia menghadapi gelombang. Ia bisa pecah dan kandas di tengah jalan. Gambaran ini kiranya menunjukkan realitas pengalaman berbangsa kita. Untuk itu Gereja terpanggil untuk mewujudkan *shalom* dengan cara menjadi agen yang mampu memulai rekonsiliasi-rekonsiliasi di masyarakat. Atau, bahkan Gereja sendiri perlu berrekonsiliasi dengan komunitas-komunitas lain di masyarakat. Seperti telah disinggung di atas, rekonsiliasi berarti relasi yang retak antara pihak-pihak menjadi pulih kembali.

### Keutuhan ciptaan

Istilah "keutuhan ciptaan" menunjuk pada persoalan ekologis yang kini makin disadari oleh semua orang, terutama orang Kristen. Apalagi sejak Kardinal Bergoglio terpilih menjadi paus. Pilihan namanya, yakni dari St. Fransiskus Assisi, sudah

menunjukkan kepeduliannya pada lingkungan hidup. Sejak memulai masa pontifikatnya, di berbagai kesempatan Paus Fransiskus menyinggung persoalan krisis ekologis. Sampai akhirnya ia menerbitkan ensiklik sosial yang khusus bicara mengenai persoalan lingkungan hidup, *Laudato Si'*. Memang para pendahulu Paus Fransiskus pernah menyinggung persoalan tersebut, namun tidak secara khusus dan mendalam. Dengan *Laudato Si'*, elemen ketiga dari JPIC ini lama kelamaan disadari Gereja sebagai bagian dari pewartaan Kabar Gembira. Memperjuangkan keutuhan ciptaan berarti mengupayakan kelayakan hidup manusia sendiri, sehingga manusia dapat hidup secara manusiawi.

Gerakan-gerakan peduli lingkungan hidup dapat kita temukan di berbagai tempat. Persoalan ini berdampak bagi siapa saja. Maka, kepedulian kepada kelestarian alam dan lingkungan hidup bisa menjadi peluang kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik, apapun latar belakang budaya atau agamanya. \*\*\*

JPIC atau KPKC bukanlah semata-mata nama salah satu komisi atau lembaga. Seperti yang telah disebut di atas, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan merupakan bagian integral dari iman Kristiani. Jika Gereja membentuk tim kerja atau lembaga yang bersentuhan dengan isu-isu keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, maka gerak ini dimaksudkan sebagai penekanan pada aspek-aspek penting pewartaan Kabar Gembira. Sebagai aspek penting, maka ketiga hal ini kiranya menjadi titik temu untuk diskusi dan aksi, untuk dialog dan kerjasama.

\*Penulis tinggal di Seminari Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta